



IMPLEMENTASI PROGRAM SMART VILLAGE DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI PEKON SUKA NEGRI JAYA KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS

Reki Setyawan¹, Muhammad Herowandi², Hinfia Mossghananza³

¹Universitas Tulang Bawang, Indonesia

²Universitas Tulang Bawang, Indonesia

³Universitas Tulang Bawang, Indonesia

Informasi Artikel

Article history:

Received 15, 09, 2025

Revised 12, 10, 2025

Accepted 25, 11, 2025

Kata Kunci:

Administrasi

Desa

Implementasi

Pemerintahan

Smart Village

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan Implementasi Program *Smart Village* dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa melalui *E-Government* di Pekon Suka Negri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi pemerintahan salah satunya yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan. Namun, pelayanan sering digambarkan sebagai proses yang berbelit-belit, tidak efekif dan efisien sehingga perlu dilakukan perbaikan dari tingkat bawah pemerintahan yaitu desa, kemudian muncullah konsep *smart village* yang mengacu pada pelayanan elektronik dan media sosial dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam transparansi dan manajemen desa sehingga dapat mendorong terwujudnya pelayanan prima serta *good governance*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari peneliti ialah Implementasi Program *Smart Village* dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa melalui *E-Government* di Pekon Suka Negri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus berdasarkan empat hal pokok sebagai dasar dari teori Implementasi menurut George Edward III penelitian ini adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Faktor penghambatnya adalah kurangnya fasilitas penunjang dan sumber daya manusia serta masyarakat yang masih kurang memahami mengenai penggunaan Program *Smart Village*.

JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Reki Setyawan

Universitas Tulang Bawang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Administrasi Publik, Indonesia

Email: rekistyawanutb@gmail.com

PENDAHULUAN

Tertib administrasi di pemerintahan desa merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dokumen dan surat-menurut dalam rangka mendukung proses pemerintahan di tingkat desa. Tugas ini dijalankan oleh perangkat desa yang memiliki tanggung jawab dalam bidang tersebut. Namun, pelaksanaannya memerlukan keahlian dan pengalaman agar hasil kerja bisa optimal, efisien, dan efektif. Kepala desa beserta aparatur desa yang turut mengelola urusan administrasi memegang peran krusial. Sebagai garda terdepan dalam sistem pemerintahan, mereka memahami secara langsung dinamika serta permasalahan yang terjadi di wilayahnya. Oleh karena itu, informasi yang mereka sampaikan kepada pihak kecamatan sangat penting untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah dan nasional, serta memastikan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang berjalan lancar. Perkembangan teknologi yang kian pesat pada era globalisasi memberikan dampak signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam membantu menyelesaikan pekerjaan melalui pemanfaatan teknologi. Namun, kemajuan ini juga harus sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar bisa memanfaatkan teknologi secara maksimal. Teknologi informasi kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Fenomena globalisasi membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dampak ini dari perspektif sosiologi, khususnya dalam melihat bagaimana teknologi dapat memengaruhi masyarakat dan proses perubahan sosial yang terjadi. Salah satu bentuk hubungan antara teknologi dan tata kelola pemerintahan adalah implementasi *E-*

Government, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Untuk menjalankan *E-Government*, dibutuhkan dukungan teknologi informasi serta aparatur yang memiliki kompetensi dalam pengelolaannya. Pemerintah memiliki kewajiban memberikan layanan publik yang efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu solusi untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. *E-Government* hadir sebagai inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan keunggulan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi selama 24 jam tanpa harus mengunjungi kantor secara langsung. Tujuan utama dari penerapan *E-Government* adalah untuk meningkatkan efisiensi birokrasi pemerintahan, termasuk dalam proses koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang kini dapat dilakukan secara daring. Seiring dengan konsep *smart city*, beberapa desa di Indonesia juga mulai mengadopsi konsep serupa dalam bentuk *Smart Village* atau desa cerdas. Secara umum, *Smart Village* merupakan konsep desa yang memanfaatkan teknologi informasi secara inovatif guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, daya saing, dan efisiensi dalam berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pekon Sukanegeri Jaya yang terletak di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, merupakan salah satu desa yang menjadi bagian dari program *Smart Village* berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 serta Keputusan Gubernur Nomor G/71/V.12/HK/2021. Dengan jumlah penduduk sekitar 5.678 jiwa, desa ini ditetapkan sebagai desa lokus *Smart Village* sesuai kriteria yang telah

ditetentukan pemerintah. Menurut Bappenas (2021), *Smart Village* diartikan sebagai upaya peningkatan layanan dasar dan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan, melalui peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan solusi inovatif lokal, serta membangun jejaring desa-desa cerdas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Program ini selaras dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan “Rakyat Lampung Berjaya”, khususnya pada janji kerja ke-30, yakni mendorong literasi digital, digitalisasi administrasi desa, dan partisipasi masyarakat melalui interaksi daring untuk mendukung tata kelola yang lebih transparan dan partisipatif. Meski telah ditetapkan sebagai desa lokus *Smart Village*, pelaksanaan tertib administrasi di Pekon Sukanegeri Jaya masih belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari lemahnya pelaksanaan tugas administrasi yang mencakup aspek administrasi umum, kependudukan, dan keuangan, yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan administrasi umum karena munculnya berbagai keluhan baik dari masyarakat maupun aparatur desa mengenai kelengkapan dokumen administrasi. Dalam tata kelola pemerintahan desa, indikator pentingnya mencakup kemampuan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang baik, serta daya saing desa. Namun, realisasi indikator tersebut sering terhambat oleh berbagai permasalahan yang ada di lapangan. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mendalam mengenai Implementasi Program *Smart Village* dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa melalui *E-Government* di Pekon Sukanegeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program ini sudah berjalan sesuai harapan dan apakah sudah memberikan kontribusi nyata

terhadap perbaikan administrasi pemerintahan di desa tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi Program *Smart Village* berperan dalam meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa melalui *E-Government* di Pekon Sukanegeri Jaya dan mengidentifikasi hambatan atau tantangan dalam penerapan Program *Smart Village* dalam tata kelola administrasi desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2017), pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai kondisi aktual dari objek yang diteliti, berdasarkan data yang faktual. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menelaah fenomena yang terjadi pada kondisi yang alami tanpa manipulasi dari peneliti, dengan pemahaman mendalam terhadap konteks yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menguraikan bagaimana implementasi program *Smart Village* di Pekon Sukanegeri Jaya mengacu pada teori George Edward III. Pembahasannya mencakup beberapa dimensi, di antaranya:

Komunikasi

Penyampaian informasi program dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung dilaksanakan dua kali dalam setahun dan dihadiri oleh aparat pekon serta masyarakat. Sementara itu, sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui media massa. Namun, keduanya masih belum optimal. Sosialisasi langsung hanya dilakukan secara terbatas, dan informasi melalui media belum sepenuhnya menjangkau seluruh warga, sehingga masih ada masyarakat yang belum memahami persyaratan administrasi desa.

Menurut George Edward III, komunikasi yang baik sangat diperlukan agar kebijakan publik dapat diterapkan secara efektif. Tujuan dan standar kebijakan harus dikomunikasikan secara

konsisten dan seragam kepada para pelaksana. Semua pihak yang terlibat, termasuk pemangku kepentingan, harus memiliki pemahaman yang sama agar implementasi kebijakan berjalan optimal.

Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik harus didukung dengan kerja sama yang terstruktur dan menguntungkan semua pihak. Aturan kerja sama antara masyarakat dan aparat pekon harus disusun secara partisipatif untuk menciptakan sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan publik di Pekon Sukanegeri Jaya—baik dari unsur pemerintah daerah maupun masyarakat—harus mampu menjalin kerja sama yang solid. Kolaborasi ini penting demi keberlanjutan program dan kemajuan pelayanan publik yang didukung oleh kebijakan pemerintah daerah melalui implementasi Program Smart Village.

Sumber Daya

Staf atau aparatur desa merupakan unsur penting dalam pelaksanaan Program Smart Village di Pekon Sukanegeri Jaya, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban administrasi pemerintahan desa melalui penerapan e-government. Aparatur pekon telah menjalankan tugasnya sesuai SOP dan pelaksanaannya terbilang cukup cepat.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, penyampaian informasi oleh pemerintah pekon dinilai sudah berjalan dengan baik. Meski demikian, intensitas penyebaran informasi masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal, terutama di masa kini yang menuntut pelayanan tetap berjalan meskipun dalam keterbatasan.

Dari segi wewenang, pengamatan menunjukkan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab oleh Kepala Pekon telah disesuaikan dengan kondisi saat ini. Fungsi dan tugas masing-masing aparatur telah dijabarkan secara formal sehingga pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai struktur organisasi.

Sarana dan prasarana pendukung juga menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan Smart Village. Untuk menunjang layanan publik yang optimal, berbagai fasilitas seperti jaringan internet, komputer, printer, dan meja antrian harus tersedia dalam kondisi baik. Sayangnya, masih terdapat sejumlah infrastruktur yang rusak, dan kecepatan jaringan internet yang belum maksimal sering menghambat penginputan data secara efisien.

Penerapan program ini juga didukung dengan kehadiran situs resmi desa: <https://sukanegerijaya-tanggamus.desa.id>, yang digunakan untuk berbagai layanan seperti pengarsipan data, permohonan surat keterangan, dan layanan administratif lainnya. Wifi gratis telah dipasang di 10 titik dan dibiayai oleh desa. Namun, dari total 303 kepala keluarga, baru sekitar 20% yang memanfaatkan website karena keterbatasan pemahaman.

Menurut George Edward III, keberhasilan pelayanan publik sangat bergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia, termasuk masyarakat yang merupakan elemen kunci dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Selain SDM, aspek finansial dan waktu juga mempengaruhi implementasi kebijakan secara signifikan.

Disposisi

Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh karakter pelaksana kebijakan, seperti kedisiplinan dan komitmen. Di Pekon Sukanegeri Jaya, disposisi implementor didukung dengan adanya pertemuan staf rutin dan pelatihan berkala. Namun, resistensi masyarakat terhadap kebijakan top-down menjadi tantangan, sehingga diperlukan pendekatan persuasif dan partisipatif. Disposisi juga menyangkut perlakuan yang adil dan setara kepada semua masyarakat, tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, prinsip keadilan dan keterbukaan menjadi dasar penting dalam operasionalisasi layanan publik, seperti pembuatan dokumen secara online.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di desa sudah berjalan berdasarkan pembagian tugas formal sesuai SOP. Pelaksanaan program mengandalkan organisasi formal desa sebagai pelaksana utama. Namun, struktur birokrasi masih menghadapi hambatan pada aspek SDM dan fasilitas. Untuk itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan perlu terus dijaga, agar pelaksanaan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.

KESIMPULAN

Hal ini ditunjukkan melalui penerapan empat indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang telah diimplementasikan dengan baik.

Dimensi komunikasi, misalnya, terbukti efektif melalui adanya sosialisasi program Smart Village kepada masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari komunikasi tersebut adalah kehadiran situs resmi desa, yaitu <https://sukanegerijayatanggamus.desa.id>, yang menyediakan berbagai layanan administrasi seperti pengarsipan data penduduk, pembuatan surat keterangan tidak mampu, surat usaha, ahli waris, serta surat keterangan tanah. Selain itu, desa juga telah menyediakan layanan internet gratis melalui pemasangan 10 titik Wi-Fi, yang masing-masing dapat menghubungkan dua perangkat per rumah tangga dengan pembatasan waktu penggunaan bagi anak-anak hingga pukul 19.00 WIB. Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut baik dari rumah maupun di balai pekon apabila membutuhkan bantuan. Namun, hingga saat ini, baru sekitar 20% dari warga yang memanfaatkan website tersebut karena keterbatasan pemahaman teknologi. Jumlah kepala keluarga di Pekon Sukanegeri Jaya tercatat sebanyak 303 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 1.041 orang. Penanggung jawab operasional website ini adalah salah satu aparatur pekon, yaitu Saudara Agung.

Adapun faktor penghambat dalam implementasi program ini meliputi

keterbatasan sarana dan prasarana, tidak stabilnya jaringan internet, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta rendahnya tingkat literasi teknologi masyarakat yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program Smart Village.

REFERENSI

- Agus Dwiyanto, 2015, Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik, UGM Press, Yogyakarta.
- Ayu, Y. S. P. (2018). Membangun Indonesia dari Pinggiran Melalui Smart Village. Kompasiana.com.
- Azizy, A Qodri. 2017. Change Management dalam Reformasi Birokrasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bambang Sunggono,2016, Metodologi Penelitian, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Budi, Winarno. 2015. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dwiyanto, Agus. 2019. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik (kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia). Yogyakarta: Gava Media.
- Handoyo, Eko. 2017. Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.
- Hamdi, Muchlis. 2018. Kebijakan Publik (Proses, Analisis dan Partisipasi). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hardiyansyah. 2018. Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
- Indiahono, Dwiyanto. 2019. Perbandingan Administrasi Publik (Model, Konsep, dan Aplikasi). Yogyakarta: Gava Media.